

BAB IV

KEBIJAKAN JEPANG TERHADAP KEBIJAKAN MILITER KOREA UTARA

Menyadari bahwa keamanan suatu negara tergantung pertama dan terutama pada upaya independen, Jepang akan melakukan upaya penuh atas inisiatif sendiri untuk mencegah berbagai situasi yang dapat mengganggu stabilitas Jepang itu sendiri. “Proactive Contribution to Peace” merupakan prinsip dasar dari diplomasi yang dilakukan oleh Jepang dengan nilai-nilai kerjasama internasional yang terkandung didalamnya. Dalam prinsip dasar ini digunakan Jepang untuk melindungi dirinya dari berbagai situasi dengan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk menghadapi masalah yang ada. Mengingat situasi lingkungan keamanan di sekitar Asia – Pasifik terutama sekitar Jepang saat ini khususnya dengan Korea Utara, Pemerintah Jepang mengeluarkan “National Defense Program Guidelines for FY 2014 and beyond” sebagai pedoman baru untuk pertahanan nasional Jepang yang didasari oleh “Defense Capability Build-up in FY2013” dan “National Security Strategy”. Korea Utara yang meningkatkan kekuatan militernya khususnya dalam pengembangan rudal balistik, senjata pemusnah masal serta telah berulang kali melakukan berbagai tindakan provokatif yang dilakukan oleh Korea Utara tentunya menjadi factor destabilisasi lingkungan khususnya di wilayah Asia Timur, menimbulkan ancaman serius bagi Jepang dimana Jepang harus benar-benar serius dalam menyikapi perilaku dari Korea Utara. Tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut tentunya membuat Jepang segera untuk membangun atau meningkatkan kembali keamanan untuk

melindungi dirinya dari ancaman Korea Utara maupun negara lain. Pada bab ini penulis akan menulis terkait kebijakan Jepang terhadap kebijakan militer yang dilakukan oleh Korea Utara.

A. Kebijakan Jepang dalam bentuk Hard Balancing

Jepang menanggapi peluncuran roket, rudal balistik maupun tindakan provokatif yang dilakukan dengan Korea Utara dengan beberapa cara, salah satunya adalah cara dengan berusaha menunjukkan kemampuan militer yang dimiliki Jepang lewat upaya peningkatan pertahanan yang dilakukan oleh Jepang, tentunya peningkatan ini hanya ditujukan serta diwujudkan sebagai bentuk pertahanan Jepang dalam menghadapi ancaman-ancaman secara fisik yang dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang nyata.

1. Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang

Pada tahun 2016 ini telah berlangsung selama 69 tahun konstitusi Jepang, selama itu pula Jepang yang memiliki kapasitas untuk membangun kemampuan militernya terhalang oleh Konstitusi 1947, berkat Konstitusi 1947 Jepang dalam dunia internasional, Jepang telah berubah menjadi negara yang semula bersifat ekspansionis, agresive dengan menkolonialisasi semenanjung Korea, sebagian Tiongkok serta beberapa negara di kawasan Asia, semenjak konstitusi 1947 diberlakukan, Jepang berubah menjadi negara yang sangat drastic, yang semula menyukai perang menjadi sebuah negara pasifis yang menekankan kegiatan serta perilaku internasionalnya terhadap solusi perdamaian sebagai bentuk serta komitmen Jepang dalam mewujudkan kemandirian serta perdamaian dunia (Cai,

2008). Hal tersebut di tunjukkan jelas di dalam pasal 9 konstitusi Jepang yang berbunyi

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized¹.

Jepang mengamandemen Konstitusi 1947 khususnya pada pasal 9 ini tentunya tak luput dari ancaman serta situasi dunia internasional sekarang ini yang dirasakan oleh Jepang sungguh semakin kompleks, Jepang menganggap bahwa mengamandemen Konstitusi 1947 khususnya pada pasal 9 merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menanggulani ataupun menyeimbangkan potensi ancaman yang berasal dari luar Jepang, seperti ancaman terkait dengan terorisme dimana saat warga negara Jepang di eksekusi Jepang tidak bisa bertindak banyak dengan cara mengirimkan pasukannya untuk melakukan aksi penyelamatan. Mau tidak mau harus Jepang harus menerima keadaan dunia internasional yang semakin berubah dan lebih kompleks kedepannya, menjadikan amandemen Konstitusi 1947 khususnya pada pasal 9 sebagai referensi dalam menghadapi, menanggulani ataupun menyeimbangkan potensi ancaman yang berasal dari luar Jepang.

Jelas dikatakan diatas bahwa Jepang tidak akan bisa untuk meningkatkan kapasitas militernya dan harus mengamandemen pasal 9 tersebut, akan tetapi kondisi yang terjadi di kawasan Asia Timur telah berkata lain serta memberikan

¹ http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html diakses pada 17 November 2016

gambaran terhadap Jepang dalam melindungi wilayahnya sendiri serta memunculkan stabilitas baik di dalam negeri Jepang ataupun di tingkat kawasan regional Asia Timur.

Kondisi regional Asia Timur telah memunculkan persepsi bagi Jepang untuk terus dapat mempertahankan integritas serta stabilitas kawasan. Persepsi ancaman tersebut muncul dari Tiongkok, dimana Tiongkok tumbuh sangat pesat baik dari segi militer maupun ekonomi, terdapat bekas sejarah kelam antara Tiongkok dan Jepang atas ekspansi Jepang ke Tiongkok pada Perang Dunia 2 tentunya membuat Tiongkok menjadi salah satu potensi ancaman yang ada, selain sejarah kelam tersebut ahir-ahir ini telah dikatakan sebelumnya bahwa telah tumbuh ekonomi yang pesat dari Tiongkok yang tentunya pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu juga diiringi dengan modernisasi militer Tiongkok yang telah dikembangkan serta didukung dengan kepemilikan senjata nuklir membuat Jepang tentunya waspada terhadap kondisi regional. Munculnya pandangan mengenai ancaman yang muncul di kawasan internasional serta Asia Timur khususnya, yang dilakukan oleh Korea Utara terkait dengan masalah nuklir Korea Utara yang dapat memicu untuk timbulnya sebuah potensi ancaman yang nyata bagi Jepang. Perkembangan senjata nuklir oleh Korea Utara tersebut membuat Jepang untuk selalu waspada akan kemungkinan konflik yang muncul diantara kedua negara akibat pengembangan dan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, tidak dapat diragukan lagi bahwa Jepang memiliki kepentingan untuk menkan pembangunan serta pengembangan dari kekuatan nuklir Korea Utara yang dimulai dari *Japan-DPRK Pyongyang Declaration* pada tahun 2002 yang berisi keinginan untuk

menormalisasi hubungan antara kedua negara demi menciptakan stabilitas dan perdamaian regional, kemudian dilanjutkan dengan *six-party talks* yang melibatkan enam negara ditujukan untuk meredam pengembangan nuklir oleh Korea Utara, dari pertemuan yang telah digelar sangatlah jelas bahwa pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sangat mengancam bagi Jepang. Faktor-faktor yang dapat mengganggu perdamaian serta stabilitas regional tersebutlah yang memaksa Jepang untuk mengamandemen Konstitusi 1947 khususnya pada pasal 9 agar militer Jepang dapat bergerak diluar Jepang.

Selain itu Amerika Serikat juga memberi dukungan terhadap diamandemennya pasal 9 dari Konstitusi Jepang ini. Ditunjukkan pada bulan April 2015 pada tanggal 27 antara Jepang dengan Amerika Serikat mendatangi kerjasama keamanan baru yang memposisikan Jepang di dalam posisi yang lebih potensial dalam kemanan global sebagai pendukung Amerika Serikat (Hendrajit, 2015). Untuk dapat merubah Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang telah mengawalinya dengan melakukan mengamandemen Pasal 96 yang mengatur tentang proses perubahan konstitusi. Dimana Pasal 96 ini berbunyi

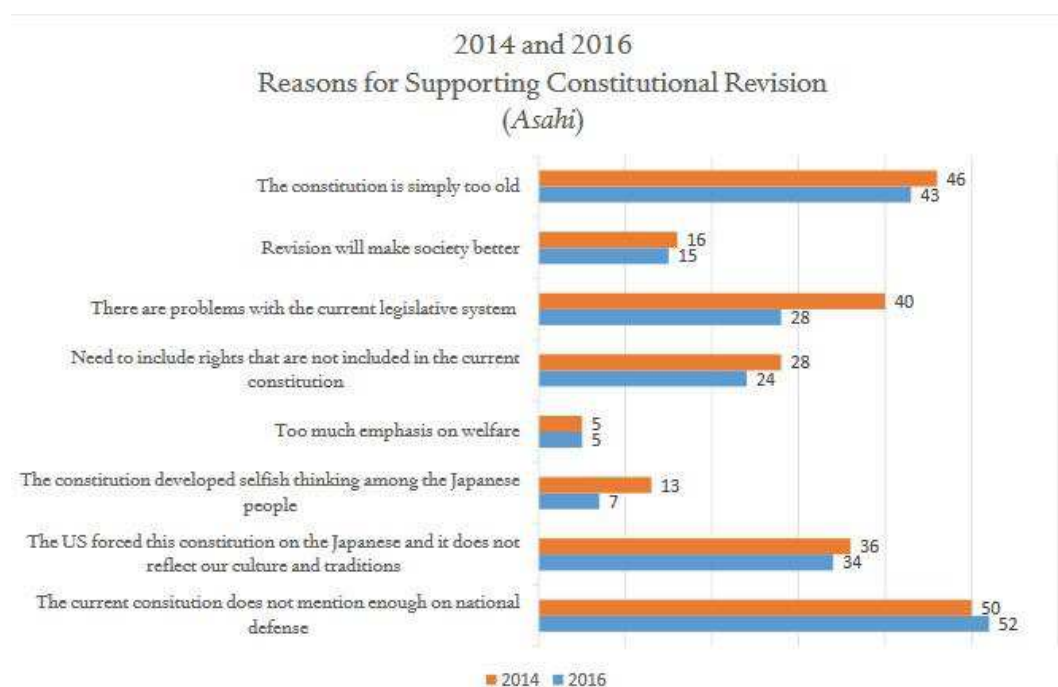
“Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds or more of all the members of each House and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or at such election as the Diet shall specify. Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution.”

Perubahan Pasal 96 ini sebagai langkah untuk mempermudah amandemen konstitusional lainnya termasuk didalamnya Pasal 9. Langkah dalam perubahan

ini tentunya melalui jalan yang terjal, meskipun *Japan Liberal Democratic Party* sebagai dominasi pada majelis tinggi dan rendah, Perdana Menteri Shinzo Abe harus meyakinkan partai oposisi (Times, 2014)

Menurut survey yang dilakukan oleh *Asahi Shinbun*, perbandingan antara tahun 2014 dengan 2016 terhadap alasan untuk menyetujui revisi terhadap konstitusi dikarenakan konstitusi sebelumnya tidak mencakup terhadap pertahanan nasional naik sebesar 2 poin, yang semula di tahun 2014 50 poin, di tahun 2016 naik menjadi 52 poin.

Figure 1. Alasan Menyetujui Revisi Konstitusi



Source : <http://blogs.cfr.org/asia/2016/08/01/japanese-public-opinion-on-constitutional-revision-in-2016/>

Dari grafik yang telah dicantumkan di halaman sebelumnya, masyarakat Jepang menyadari bahwa perlunya untuk lebih menonjolkan sebuah konstitusi yang digunakan untuk pertahanan nasional.

2. Perubahan Justice Defense Agency menjadi Ministry of Defense

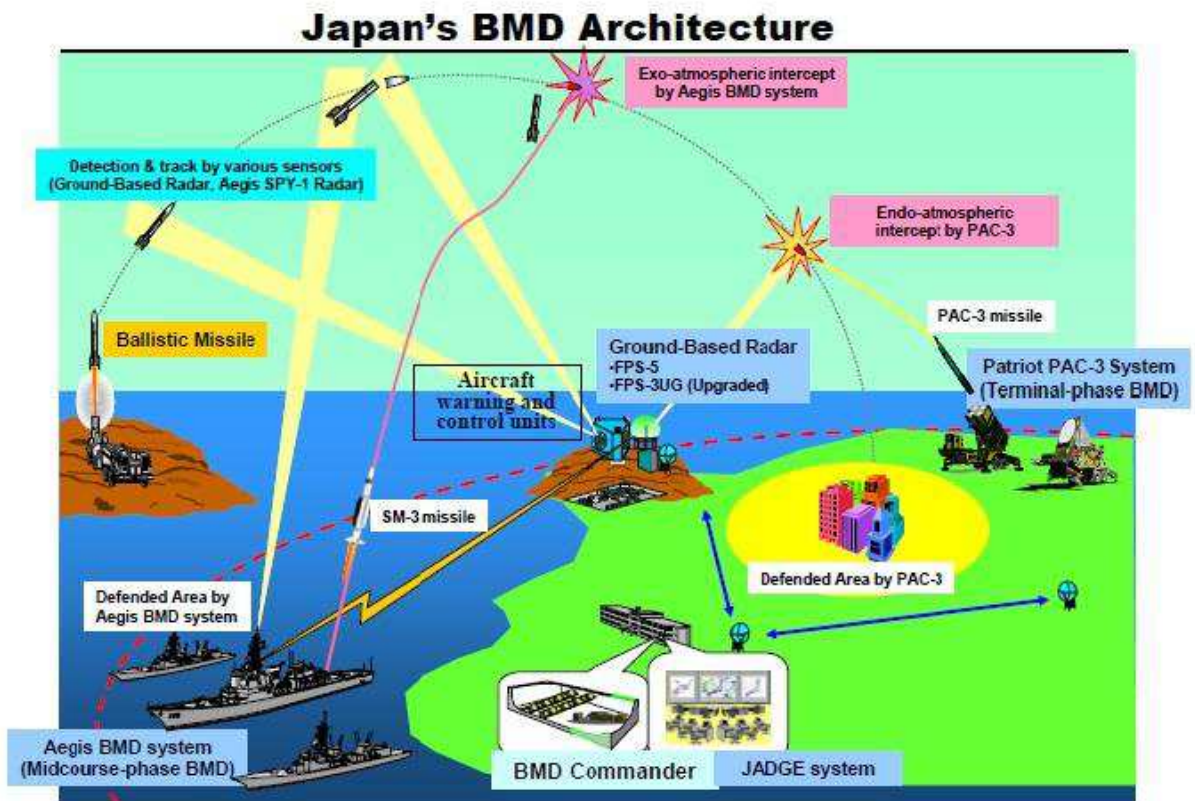
Jepang berusaha menjadi sebuah negara normal untuk dapat berperan aktif dalam komunitas internasional, dalam upaya menangani masalah internasional seperti halnya terorisme Jepang berusaha untuk meningkatkan kemampuan serta kapabilitas dari *Japan Self Defense Forces. National Defense Program Guidelines* 2004 yang diajalkan pada tahun 2005 yang digunakan sebagai kebijakan pedoman pertahanan baru Jepang dengan mengubah *Just Defense Agency* menjadi *Ministry of Defense* (Faiola, 2006), perubahan ini merupakan pandangan Jepang terhadap situasi yang sedang berlangsung di kawasan Asia Timur yaitu meningkatnya intensitas uji coba senjata oleh Korea Utara begitu pula dengan pertumbuhan serta peningkatan budget militer yang dimiliki oleh Tiongkok, secara tidak langsung aktifitas yang sering dilakukan oleh kedua negara ini memaksa Jepang untuk melakukan perubahan untuk menyikapi apa yang dilakukan oleh Tiongkok dan Korea Utara, dengan ditingkatkannya status *Justice Defense Agency* menjadi *Ministry of Defense*, lebih cepat. Perubahan ini membawa Jepang memiliki kesempatan untuk meningkatkan anggaran pertahanannya yang semula hanya satu persen dari GNP menjadi lebih dari itu (Halloran, 2007). Dengan perubahan ini secara tidak langsung Jepang dapat meningkatkan kapasitas militernya dengan alasan untuk melakukan pertahanan diri, selain itu langkah perubahan ini sebagai bentuk prinsip dasar Jepang untuk selalu aktif dalam kontribusi terhadap perdamaian dunia. Perubahan ini menawarkan kesempatan lebih besar terhadap Jepang untuk melakukan dukungan logistic dalam konflik

regional serta merupakan langkah yang diyakini bisa mengubah keseimbangan kekuatan yang berada di wilayah Asia Timur pada khususnya.

3. Ballistic Missile Defence oleh Jepang

Berdasarkan hubungan antara Jepang dengan Amerika Serikat, pasukan Amerika merupakan perisai bagi kepentingan Jepang dan juga pedang bagi pertahanan Jepang yang digunakan sebagai pemelihara stabilitas di Asia Timur. Aktifitas Uji coba senjata dalam bentuk misil yang sering dilakukan oleh Korea Utara dalam beberapa tahun ini memaksa Jepang untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dirinya. Setelah meluncurkan Taepodong-1 pada tahun 1998 oleh Korea Utara, Jepang memutuskan untuk melakukan penelitian dan pengembangan sistem pertahanan rudal bekerja sama dengan Amerika Serikat. Pada bulan Desember 2003, pemerintah Jepang memutuskan untuk memulai program pertahanan rudal balistik (*Ballistic Missile Defence* atau BMD) (Ministry of Defense, Japan's BMD, 2003). Pada tahun 2004 Pedoman Desember National Defense Program (NDPG) diterbitkan dan menetapkan pengembangan bersama sistem pertahanan rudal dengan Amerika Serikat, pada bulan Desember 2005, kabinet Jepang memutuskan bahwa Tokyo bersama-sama akan mengembangkan lebih maju mengenai *Ballistic Missile Defence*.

Figure 2. Skema BMD Jepang

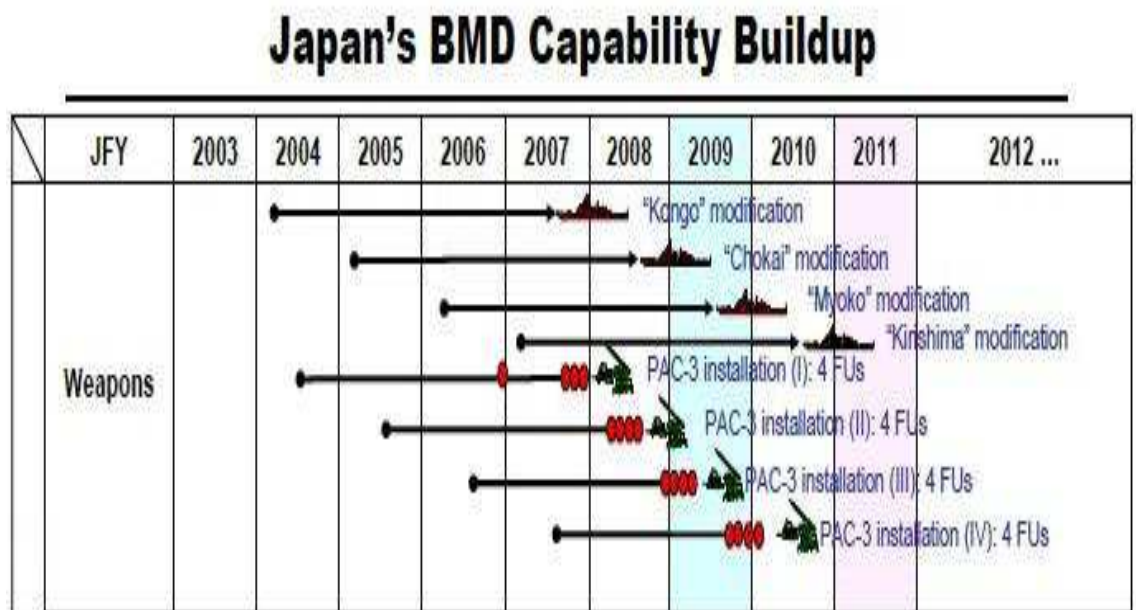


source : Japan BMD

Jepang telah melakukan banyak pengembangan terhadap program *Ballistic Missile Defence* ini. Pada tahun 2007 dalam Program ini Jepang berhasil melakukan upgrade pada Program *Ballistic Missile Defence* yaitu dengan mengaktifkan PATRIOT PAC-3 yang merupakan *Ballistic Missile Defence* berbasis darat serta rudal pencegat pertama yang dimiliki oleh Jepang yang berada di Pangkalan Udara Iruma disusul pada bulan Desember Jepang berhasil melakukan pengembangan *Ballistic Missile Defence* melalui JS Chokai, selang dua tahun pada 2009 kemudian Jepang selesai mengembangkan kembali kepada JS Myoko. Pada tahun 2010 tepatnya bulan April, Jepang kembali membuka *Ballistic Missile Defence* PATRIOT PAC-3 di Pangkalan Udara Ashiya dan pada

bulan Oktober 2010 Jepang juga selesai melakukan pengembangan pada JS Kirishima.

Figure 3. Pengembangan BMD Jepang



source : Japan BMD

B. Kebijakan Jepang dalam bentuk Soft Balancing

Konstitusi Jepang 1947 membuat Jepang bertekad untuk mewujudkan serta menyelesaikan masalah dalam lingkup internasional dengan menggunakan cara-cara yang damai. Dalam menyikapi tindakan profokatif yang dilakukan dengan Korea Utara, Jepang melakukan berbagai tindakan *Soft Balancing* guna menunjukkan bahwa Jepang bukan lagi negara yang agresive, melainkan telah bertansformasi menjadi negara yang cinta damai dan setiap permasalahan diselesaikan dengan cara damai. Perwujudan itu diwujudkan dalam bentuk :

1. Meningkatkan Kerjasama dengan Amerika Serikat

Jepang dan Amerika Serikat telah melakukan kerjasama aliansi yang mempunyai peran penting bagi kedua negara. Berdasarkan *Japan–U.S. Security Treaty*, Aliansi Jepang-AS berpusat pada fungsi keamanan bilateral yang berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran tidak hanya dari dan untuk Jepang, tetapi juga untuk kawasan Asia-Pasifik serta dunia pada umumnya. Kondisi lingkungan keamanan sekitar Jepang yang semakin parah serta Amerika disaat yang sama ingin mempertahankan serta memperkuat keterlibatan dan kehadirannya di Asia –Pasifik menjadikan aliansi keamanan serta kemananan antara Jepang dengan Amerika Serikat menjadi lebih penting. Terdapat tujuh poin pedoman dasar dalam aliansi antara Jepang dengan Amerika Serikat diantaranya; pedoman baru yang lebih spesifik yang ditekankan dalam keamanan serta kerjasama; memperkuat koordinasi aliansi di masa damai; memastikan keadaan disekitar Jepang aman dan damai; kerjasama regional dan global dalam rangka mewujudkan perdamaian serta keamanan dunia, kerjasama dalam bidang luar angkasa dan *cyberspace*;meningkatkan efektivitas dalam kerjasama bilateral dengan melalui kerjasama alutista dan teknologi, kerjasama intelijen dan keamanan informasi serta pendidikan dan pertukaran penelitian yang difungsikan sebagai dasar dari keamanan dan kerjasama pertahanan; pedoman dasar untuk meninjau kembali dalam aliansi antara Jepang dengan Amerika Serikat (Ministry of Defense, Japan’s Security and Defense Policy and the Japan-U.S. Alliance, 2016).

Jelas dimaksudkan bahwa Aliansi antara Amerika Serikat dengan Jepang menyatakan bahwa kedua negara saling membutuhkan satu sama lain, dimana Jepang membutuhkan perlindungan Amerika Serikat dari berbagai ancaman yang dianggap mampu mengganggu stabilitas Jepang. Sedangkan Amerika Serikat membutuhkan Jepang sebagai mitra strategis untuk tetap memiliki pengaruh di kawasan Asia mengingat dari kebangkitan ekonomi, militer Tiongkok, uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara maupun konflik mengenai laut Cina Selatan yang semakin memanas. Tak hanya dalam bidang militer pertahanan saja, Jepang merupakan mitra Jepang dalam bidang ekonomi dimana Honda, Nissan, Toyota yang notabene merupakan perusahaan Jepang dapat membuka pabrik otomotif di Amerika Serikat yang menciptakan 1,3jt pekerjaan pada tahun 2013 (Herman, 2016), selain itu kemitraan ini berkembang secara inovatif dalam bidang manufaktur baru seperti robotika.

Figure 4. Kekuatan Militer di Jepang

Japan Self-Defense Forces (SDF) 2015 defense budget: 5.05 trillion yen (\$42 billion)	U.S. Forces Japan (USFJ)
Maritime Self-Defense Forces (MSDF) 45,500 sailors 47 surface combatants (6 Aegis BMD-equipped) including 2 helicopter carriers 18 submarines, 166 maritime patrol aircraft	U.S. Navy 19,600 sailors ashore and afloat 1 aircraft carrier, 2 cruisers and 8 destroyers (8 Aegis-equipped), 70 aircraft, 3 amphibious transport ships, 1 command ship, 2 mine countermeasures ships
Air Self-Defense Forces (ASDF) 47,100 airmen 552 combat capable aircraft: 201 F-15J fighters, 17 AEW&C aircraft, 66 transport aircraft, 17 PAC-3 BMD units	U.S. Air Force 12,400 airmen 1 fighter wing at Misawa AB with 18 F-16C/D 1 fighter wing at Kadena AB 24 F-15C/D, 2 AEW&C aircraft 1 airlift wing, total of 14 transport aircraft; 1 special ops group; 8 SAR helicopters
Ground Self-Defense Forces (GSDF) 151,050 soldiers 1 tank division, 3 armored infantry divisions, 5 light infantry divisions, 1 airborne brigade, 1 helicopter brigade, 3 artillery brigades, 2 air defense brigades, 1 special ops unit	U.S. Army 2,300 soldiers 1 special forces group, 1 aviation battalion, 1 air defense regiment Forward operational headquarters
SDF Amphibious Assets GSDF is building up an Amphibious Rapid Deployment Brigade of 3,000 personnel 3 landing ships (LST), 20 landing craft	U.S. Marine Corps 15,700 marines 1 Marine division, 12 F/A-18D aircraft, 24 MV-22 transport aircraft, 12 refueling aircraft
Reserve 54,200 soldiers, 1,100 sailors, 800 airmen	U.S. Strategic Command 2 AN/TPY-2 X-band radars

source : The U.S.- Japan Alliance hal 14

Keadaan lingkungan Jepang khususnya Asia Timur yang memiliki tensi cenderung tinggi ahir-ahir ini, serta untuk mempertahankan dan memperkuat keterlibatan di Asia-Pasifik, memperkuat Aliansi Jepang-AS menjadi lebih penting bagi kedua negara.

Figure 5. Fasilitas Militer Amerika di Jepang



Kehadiran militer milik AS di Jepang tidak hanya memberikan kontribusi untuk pertahanan Jepang, tetapi juga berfungsi sebagai *de-terrence* melawan dan respon terhadap situasi di kawasan Asia Timur begitupula di Asia-Pasifik wilayah, dan berfungsi sebagai inti dari *Japan–U.S. Security Treaty*. Bentuk aliansi antara Jepang dengan Amerika di tunjukkan dengan wujud nyata diantaranya :

a. Ballistic Missile Defense Cooperation

Uji coba peluncuran rudal oleh Korea Utara pada tahun 1998 menjadi titik awal dari *Ballistic Missile Defense Cooperation*, Jepang dan Amerika Serikat telah bekerja sama erat pada pengembangan teknologi *Ballistic Missile Defense* (BMD) pada tahun 1999 dimana kedua negara menandatangani *Memorandum of*

Understanding untuk melakukan penelitian serta pengembangan terkait dengan *Ballistic Missile Defense* dalam menanggapi ancaman rudal balistik dari Korea Utara, system kerja *Ballistic Missile Defense* adalah dengan cara mengintersep rudal yang dikirimkan oleh lawan dengan meluncurkan rudal yang kita miliki sebelum rudal itu memasuki atau sampai pada target. Perdana Menteri Junichiro Koizumi memutuskan pada Desember 2003 untuk menggunakan sistem *Ballistic Missile Defense* untuk pertahanan nasional. Pembelian Jepang terhadap teknologi BMD AS dikembangkan tahun 2003 memberikan kemampuan BMD kedua yang paling ampuh di dunia. SDF memiliki 17 PAC-3 unit dikerahkan di seluruh kepulauan Jepang dan enam kapal dengan software pertahanan Aegis udara / rudal, empat di antaranya dilengkapi dengan pencegat SM-3 Blok IA. Militer Amerika juga telah mengerahkan PAC-3 unit di pangkalan di Jepang dan kapal Aegis berkemampuan BMD di laut sekitarnya (Emma Chanlett-Avery, 2016). Dengan menerapkan system *Ballistic Missile Defense* dengan bekerjasama bersama Amerika Serikat, Jepang telah berkontribusi terhadap kemajuan teknologi terkait dengan *Ballistic Missile Defense* tentunya dengan melakukan kerjasama ini beban biaya pengembangan teknologi menjadi lebih ringan bagi kedua negara untuk terus mengembangkan generasi *Ballistic Missile Defense* yang lebih sempurna unruk membantu dalam mengatasi ancaman terutama rudal.

b. Maritime Defense Cooperation

Merupakan kerjasama antara Maritime Self-Defense Force (MDSF) dan U.S. Navy yang pada perang dingin dibentuk untuk menangkal kekuatan Uni Soviet di Pasifik, akan tetapi dalam fungsinya sekarang tak hanya sebagai pasukan yang

dibentuk untuk melindungi sector laut, tetapi digunakan juga untuk beberapa misi dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dan kemanusiaan (Emma Chanlett-Avery, 2016). *Maritime Defense Cooperation* ini memiliki dua prinsip yang mendasar yaitu angkatan laut merupakan ujung tombak dari strategi maritime serta operasi yang dilakukan bersama dengan sekutu. Kedua hal ini merupakan hal yang saling terkait satu sama lain. Dimana kondisi geografis berupa perairan laut membuat kedua poin yaitu angkatan laut merupakan ujung tombak dari strategi maritime serta operasi yang dilakuakn bersama dengan sekutu dalam kerjasama maritime Amerika Serikat dengan Jepang untuk melakukan hal-hal yang efektif sekaligus menghemat dana dalam melakukan tugasnya. Memanasnya kondisi Laut Tiongkok Selatan dan Kepulauan Senkaku menjadi sorotan sekarang ini, menjadikan *Maritime Defense Cooperation* antara Jepang dengan Amerika Serikat menjadi terfokus dalam hal ini.

c. Penjualan Alutista ke Jepang

Jepang menjadi salah satu pelanggan tetap dari produk alutista yang di buat oleh Amerika Serikat. Dibuktikan selama tahun 2010 -2014 penjualan alutista Amerika Serikat ke Jepang mencapai \$ 1.190.000.000/tahun, Menjadikan *Self Defense Forces* hamper memiliki kesamaan peralatan militer dengan militer Amerika Serikat, pembelian yang dilakukan Jepang berupa pesawat tempur, peningkatan BMD, tank dan berbagai macam jenis alutista lainnya. (Emma Chanlett-Avery, 2016).

2. Penataan Kembali Hubungan dengan Tiongkok dan Korea

Selatan

Tidak dapat dipungkiri bahwa Jepang, Tiongkok dan Korea merupakan bagian terpenting dari pertumbuhan ekonomi di Asia, dikarenakan ketiga negara tersebut termasuk kedalam 20 besar jajaran negara dengan GDP tertinggi. Tentunya dengan pencapaian ekonomi tersebut memiliki dampak baik secara regional maupun internasional.

Jepang tidak bisa begitu saja sendirian dalam menghadapi situasi yang tidak stabil di kawasan Asia Timur, maka dari itu Jepang perlu membentuk sebuah hubungan dengan negara-negara tetangganya seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Hubungan antara ketiga negara tersebut memiliki dampak terhadap situasi keamanan atau stabilitas di kawasan Asia Timur. Pada tahun 2008 Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan mengadakan trilateral summit yang dihadiri oleh tiga pemimpin negara tersebut di Fukuoka Jepang, dalam awal pertemuan ini yang menjadi bahasan mengenai isu ekonomi internasional, penanganan bencana serta langkah untuk mempromosikan hubungan kerjasama antara Jepang , Tiongkok dan Korea Selatan yang kemudian topic bahasan pun semakin banyak seperti mengenai agrikultur, pendidikan, fasilitas serta perdagangan bebas (Japan M. o., The Sixth Japan-China- ROK Trilateral Summit, 2015). Amerika Serikat merespon hal ini sebagai langkah yang baik, dikarenakan Korea Selatan-Jepang merupakan bagian aliansi dari Amerika Serikat. Dengan menjalin hubungan bersama dengan Tiongkok, hal ini berupaya untuk mengurangi pertentangan yang ada di kawasan Asia Timur khususnya [Teo, 2015]. Dari pertemuan yang dihadiri

oleh para petinggi dari masing-masing negara berlanjut pertemuan para menteri luar negeri dari Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan untuk membahas masalah yang lebih terperinci lagi pada tahun 2010 dimana tidak hanya membahas ekonomi, bencana serta mempromosikan hubungan tetapi juga membahas mengenai isu-isu yang sedang hangat di dunia internasional maupun kawasan (Japan M. o., MOFA, 2010). Pada pertemuan yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara pada tahun 2012 akhirnya secara spesifik membahas mengenai uji coba misil yang dilakukan oleh Korea Utara, dalam pertemuan kali ini Jepang secara vocal menyuarakan bahwa apa yang dilakukan oleh Korea Utara sangat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Tak berhenti disitu saja, pada bulan agustus tahun 2016 ini tepatnya pada saat Jepang, Tiongkok, Korea Selatan mengadakan Trilateral Foreign Minister Meeting yang ke delapan berlangsung di Tokyo, Korea Utara meluncurkan uji coba rudal balistiknya melalui *Submarine-Launched Ballistic Missile* membuat ketiga negara tersebut yaitu Jepang, Tiongkok, Korea Selatan sepakat tindakan provokasi-provokasi yang mengganggu stabilitas kawasan khususnya di Asia Timur telah dilakukan oleh Korea Utara, yaitu peluncuran rudal balistik melalui *Submarine-Launched Ballistic Missile* (SLBM), benar-benar tidak dapat diterima (Ju-min Park, 2016).